



The Impact of the Decent Housing Assistance Program (RTLH) on the Welfare Level of the Community in West Aceh District

Livia Anzalita*¹, Sri Rosmiati Sani², Mutiara Shifa³

* liviaanzalitambo@gmail.com

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teuku Umar, Aceh Barat, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of the Decent Housing Assistance Program (RTLH) on the welfare level of the community in West Aceh District. Using a quantitative approach and multiple linear regression method, this research examines the effect of the variables of Providing Ease and Licensing, Provision of Infrastructure, Facilities, and Public Utilities, Initiating Land Banking, and the Establishment of Zones for Prosperous Housing on community welfare. The analysis results show that the variables of Providing Ease and Licensing and Provision of Infrastructure, Facilities, and Public Utilities have a significant impact on community welfare in partial tests, while the variables of Initiating Land Banking and Establishing Zones do not have a significant partial effect. However, simultaneously, all four variables have a significant impact on community welfare with a coefficient of determination of 61.4%. These findings indicate the importance of synergy among various aspects of the RTLH program to improve community welfare and the need to optimize policies related to infrastructure, administrative ease, and more strategic housing planning.

Keywords: RTLH Assistance, Community Welfare, Licensing Ease, Infrastructure and Facilities, Land Banking, Prosperous Housing Zone.

PENDAHULUAN

Permasalahan perumahan di Kabupaten Aceh Barat menjadi isu yang sangat penting karena banyak masyarakat belum memiliki rumah yang layak huni. Keterbatasan akses terhadap perumahan yang memadai memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan observasi penelitian, diketahui bahwa usulan penerima pembangunan rumah tinggal layak huni (RTLH) datang dari berbagai kecamatan seperti Woyla, Woyla Barat, Bubon, Meureubo, Arongan Lambalek, Johan Pahlawan, Panton Reu, Pante Ceureumen, dan Kaway XVI. Kondisi ini menunjukkan masih besarnya kebutuhan akan rumah layak huni di wilayah tersebut.

Konflik terkait ketersediaan rumah layak huni dapat dilihat dari berbagai aspek, terutama aspek sosial dan ekonomi (Safii dkk., 2019). Tingkat kemiskinan yang tinggi serta keterbatasan akses terhadap kredit menjadi hambatan utama dalam pemerataan bantuan perumahan. Selain itu, perlu evaluasi terhadap distribusi bantuan dari pemerintah pusat dan kelayakan rumah-rumah yang telah dibangun, baik dari aspek struktur bangunan maupun aspek kesehatan, guna menentukan apakah penerima bantuan termasuk dalam kategori miskin (Safii dkk., 2019).

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi (2020) Tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh tercatat sebesar 14,99%. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka tersebut adalah dengan membangun rumah yang layak huni bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk hidup sejahtera, memiliki tempat tinggal, menikmati lingkungan yang sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Sejalan dengan hal itu, rumah yang layak huni menjadi hak dasar manusia yang harus dipenuhi (Ihwan dkk., 2022), karena rumah yang aman, teratur, dan sehat berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat (Ramadhan dan Sebayang, 2022).

Aceh Barat yang memiliki tantangan ekonomi dan sosial tinggi menjadi fokus dalam RTLH. Program ini bertujuan menyediakan hunian aman dan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah yang tidak layak huni berpotensi menimbulkan dampak negatif pada aspek kesehatan, pendidikan, hingga stabilitas ekonomi. Dengan demikian, keberadaan program RTLH diharapkan menjadi solusi konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

Hasil observasi menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Aceh Barat masih banyak yang membutuhkan bantuan rumah layak huni karena kondisi ekonomi yang lemah. Mayoritas penduduknya berpenghasilan rendah, sehingga tidak mampu membangun rumah secara mandiri. Oleh sebab itu, program bantuan RTLH diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Program Bantuan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Aceh Barat.”

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi beberapa poin utama, antara lain: bagaimana pengaruh pemberian kemudahan dan perizinan, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), perintisan land banking, serta penetapan zona untuk rumah sejahtera terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masing-masing aspek tersebut terhadap dampaknya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menilai bagaimana faktor-faktor ini dapat menjadi pendorong utama dalam pembangunan hunian layak bagi warga kurang mampu.

Manfaat dari penelitian ini yaitu, pertama, bagi penulis sendiri, penelitian ini menjadi wadah untuk menambah pengetahuan dan pengalaman, khususnya dalam membandingkan teori dengan praktik langsung di lapangan. Kedua, bagi lembaga atau institusi terkait, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi dalam pelaksanaan dan evaluasi program-program bantuan perumahan serupa ke depannya. Adapun kerangka teoritis pada penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel-variabel program RTLH dengan kesejahteraan masyarakat, dan dari kerangka tersebut dirumuskan hipotesis bahwa “program bantuan rumah tinggal layak huni (RTLH) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan metode regresi linier berganda guna menganalisis sejauh mana variabel-variabel terkait RTLH berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Populasi penelitian adalah seluruh masyarakat penerima manfaat program RTLH di Kabupaten Aceh Barat. Sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria tertentu yang relevan terhadap tujuan penelitian, sehingga diperoleh jumlah sampel yang representatif untuk analisis statistik.

Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disusun berdasarkan variabel penelitian, yaitu Pemberian Kemudahan dan Perizinan (X1), Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas

Umum (X2), Perintisan Land Banking (X3), Penetapan Zona untuk Rumah Sejahtera (X4), dan variabel terikat Kesejahteraan Masyarakat (Y). Setiap variabel diukur menggunakan skala Likert untuk mendapatkan data kuantitatif yang valid dan reliabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 1.1

Uji Normalitas Residuals – Model Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	6.29182195
Most Extreme Differences	Absolute	.094
	Positive	.084
	Negative	-.094
Test Statistic		.094
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Uji Multikolinieritas

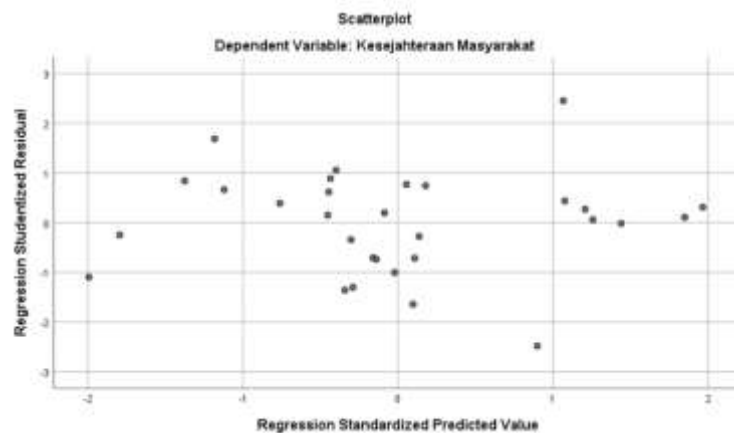
Tabel 1.2

Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	11,697	8,187		1,429	,165		
	X1	1,756	,680	,366	2,582	,016	,770	1,299
	X2	1,279	,587	,350	2,178	,039	,596	1,677
	X3	1,313	,835	,240	1,572	,129	,659	1,517
	X4	,264	,523	,073	,505	,618	,735	1,361
a. Dependent Variable: Y								

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 1.2
Uji Heteroskedastisitas – Scatterplot



Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 1.3
Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,697	8,187		1,429	,165
	X1	1,756	,680	,366	2,582	,016
	X2	1,279	,587	,350	2,178	,039
	X3	1,313	,835	,240	1,572	,129
	X4	,264	,523	,073	,505	,618

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Diolah, 2025

Uji Hipotesis

Uji-t

Tabel 1.4
Uji- t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,697	8,187		1,429	,165
	X1	1,756	,680	,366	2,582	,016
	X2	1,279	,587	,350	2,178	,039
	X3	1,313	,835	,240	1,572	,129
	X4	,264	,523	,073	,505	,618

a. Dependent Variable: Y

Uji-F**Tabel 1.5**

Uji- F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1828,643	4	457,161	9,955	,000 ^b
	Residual	1148,024	25	45,921		
	Total	2976,667	29			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2

Sumber: Data Diolah, 2025**Uji Koefisien Determinasi (R²)****Tabel 1.6**

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,784 ^a	,614	,553	6,776

a. Predictors: (Constant), X4.TOTAL, X1.TOTAL, X3.TOTAL, X2.TOTAL

Sumber: Data Diolah, 2025**Pembahasan**

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel Pemberian Kemudahan dan Perizinan (X1) memiliki hubungan yang signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y), yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi $0,016 < 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin mudah akses masyarakat terhadap perizinan dan kemudahan administratif dalam memperoleh rumah layak huni, maka tingkat kesejahteraan mereka cenderung meningkat. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Mundok et al., (2022) yang menyatakan bahwa indikator pemberian kemudahan dan perizinan (X1) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Y). Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini Ha1 diterima dan H01 ditolak. Temuan ini memperkuat asumsi bahwa peran pemerintah dalam mempermudah proses administratif dapat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kesejahteraan warga, terutama yang berada pada kategori ekonomi rentan.

Hasil ini juga menunjukkan bahwa semakin mudah masyarakat memperoleh akses terhadap proses perizinan dan pelayanan administratif lainnya dari pemerintah, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan yang dirasakan. Secara teoritis, hal ini sejalan dengan Teori Kebutuhan Dasar (Basic Needs Theory) dari Abraham Maslow (1943), yang menyatakan bahwa kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang layak dan rasa aman harus terlebih dahulu dipenuhi sebelum individu dapat mencapai kesejahteraan hidup secara menyeluruh. Dari perspektif kebijakan, pemerintah daerah berperan dalam memastikan bahwa sistem perizinan dalam program RTLH berjalan dengan efektif dan inklusif. Penyederhanaan regulasi serta penerapan sistem digital berbasis teknologi dapat mempercepat akses terhadap bantuan perumahan, sehingga berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil analisis regresi juga menunjukkan bahwa variabel Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (X2) memiliki hubungan yang signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y), yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi $0,039 < 0,05$. Temuan ini

mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas dan ketersediaan prasarana serta utilitas umum, maka kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. Hasil ini didukung oleh penelitian Mundok et al., (2022) yang menyatakan bahwa indikator tersebut berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan. Dengan demikian, hipotesis Ha2 diterima dan H02 ditolak. Hasil ini memperkuat pentingnya infrastruktur sebagai elemen dasar pembangunan yang menunjang aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Secara teoritis, hal ini dijelaskan oleh Teori Pembangunan Infrastruktur (Grindle, 1997), yang menyebutkan bahwa infrastruktur yang memadai mendukung aktivitas ekonomi dan mempercepat pelayanan sosial. Selain itu, Teori Kebutuhan Dasar Maslow (1943) juga mendukung kesimpulan ini, bahwa penyediaan sarana dan utilitas umum merupakan bagian dari kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar masyarakat dapat mencapai taraf hidup yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, fasilitas seperti air bersih, listrik, jalan, dan sanitasi bukan hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi bagian esensial dari rumah yang layak huni. Maka, penyediaan sarana dan utilitas umum tidak hanya berdampak fisik pada tempat tinggal, tetapi juga berdampak luas terhadap kesejahteraan sosial, kesehatan, dan produktivitas masyarakat.

Berbeda dengan dua variabel sebelumnya, hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Perintisan (Penyediaan) Land Banking (X3) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y), ditunjukkan oleh nilai signifikansi $0,129 > 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun land banking memiliki potensi dalam mendukung kesejahteraan, implementasinya dalam program RTLH di Aceh Barat belum berdampak nyata. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Mundok et al., (2022) yang menyatakan bahwa penyediaan land banking berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan. Oleh karena itu, hipotesis H03 diterima dan Ha3 ditolak. Ketidaksesuaian antara teori dan kenyataan ini bisa disebabkan oleh kurangnya realisasi lapangan atau ketidakterjangkauannya manfaat program oleh masyarakat penerima.

Secara teoritis, temuan ini bertentangan dengan Teori Kebutuhan Dasar Maslow (1943), yang menyebutkan bahwa kepemilikan atau akses terhadap lahan merupakan kebutuhan penting dalam memperoleh tempat tinggal yang layak. Kegagalan implementasi land banking bisa terjadi karena masih sebatas administratif dan belum menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Masyarakat mungkin belum merasakan adanya distribusi lahan secara konkret, atau bahkan tidak mengetahui keberadaan program tersebut akibat rendahnya sosialisasi. Ketidakterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi juga bisa menjadi salah satu alasan mengapa variabel ini belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan.

Begitu pula, hasil analisis pada variabel Penetapan Zona untuk Rumah Sejahtera (X4) menunjukkan bahwa variabel ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y), yang terlihat dari nilai signifikansi $0,618 > 0,05$. Meskipun secara teori zonasi permukiman penting dalam perencanaan tata ruang, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh Barat. Hasil ini juga bertentangan dengan penelitian Mundok et al., (2022), sehingga hipotesis H04 diterima dan Ha4 ditolak. Hal ini dapat diartikan bahwa zonasi yang telah ditetapkan belum ditindaklanjuti dengan pembangunan fisik atau dukungan fasilitas yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Ketidaksesuaian ini bertentangan dengan Teori Perencanaan Tata Ruang (Friedmann, 1987) dan Teori Kesejahteraan Sosial (Todaro & Smith, 2012), yang menekankan pentingnya zonasi dalam menciptakan lingkungan permukiman yang layak. Namun, apabila zonasi hanya bersifat administratif tanpa pembangunan konkret, maka tidak ada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, pemerintah perlu

mengimplementasikan zona rumah sejahtera secara menyeluruh, melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan. Pendekatan partisipatif akan meningkatkan rasa memiliki dan memperkuat dampak kebijakan terhadap kesejahteraan warga.

KESIMPULAN

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Aceh Barat memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Secara individual, variabel Pemberian Kemudahan dan Perizinan (X1) serta Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (X2) terbukti memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan taraf kesejahteraan. Sementara itu, variabel Perintisan Land Banking (X3) dan Penetapan Zona untuk Rumah Sejahtera (X4) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara parsial. Namun secara simultan, keempat variabel tersebut bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Nilai koefisien determinasi sebesar 61,4% menunjukkan bahwa sebagian besar variasi dalam tingkat kesejahteraan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel dalam program RTLH yang dikaji, sementara sisanya disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar model. Dengan demikian, keberhasilan program RTLH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan hasil dari keterpaduan berbagai komponen, sehingga diperlukan upaya optimalisasi, terutama dalam aspek infrastruktur, kemudahan perizinan, serta perencanaan perumahan yang lebih strategis dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Program RTLH terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan kebijakan dan penelitian selanjutnya. Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat implementasi program RTLH dengan memastikan mekanisme pemberian kemudahan dan perizinan berjalan secara efektif melalui penyederhanaan prosedur administratif agar mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Kedua, peningkatan kualitas prasarana dan sarana umum seperti akses jalan, listrik, air bersih, serta fasilitas publik lainnya menjadi penting agar manfaat program RTLH lebih optimal. Ketiga, optimalisasi kebijakan land banking sebagai strategi penyediaan lahan perumahan rakyat perlu dilakukan melalui perencanaan yang strategis dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lahan. Keempat, penetapan zona rumah sejahtera perlu dikaji ulang agar selaras dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal serta didukung oleh pembangunan infrastruktur yang memadai. Kelima, untuk memperluas pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat, penelitian selanjutnya disarankan mempertimbangkan variabel lain seperti pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial, serta menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti metode kualitatif atau mix-method.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2020). Pedoman Pengukuran Capaian Pembangunan Perumahan & Permukiman Berbasis Hasil (Outcome). *Kementerian Ppn/ Bappenas*, 1(1), 1–83.
- Fitriyani, A., Asnur, S. F., & Idris, S. (2021). Implementasi Sarana Dan Prasarana Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Pada Perencanaan Perumahan Pekerja Pt. Cor *Jurnal Arsitektur ...*, 3(2), 78–88.

- Ihwan, M., Fadillah, C., Hidayah, S. N., & Sumardiana, B. (2022). Pemenuhan Hak Atas Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal Of Legal Community Engagement) Jphi*, 5(1), 89–101. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.50011>
- Mundok, Z., Rotinsulu, T. O., & Masloman, I. (2022). Pengaruh Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni (Rtlh) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah ...*, 22(3), 13–26.
- Ramadhan, M. N., & Sebayang, A. F. (N.D.). *Strategi Penyediaan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr) Kota Cilegon*. 35–42.
- Safii, S., Kadir, A., & Lubis, Y. A. (2019). Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (Jipikom)*, 1(2), 165–175. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v1i2.153>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Alfabeta. Alfabeta.